

**MENINGKATKAN  
PERJUANGAN  
MELAWAN KEMISKINAN  
DI ASIA DAN PASIFIK**

Strategi Pengurangan Kemiskinan  
Asian Development Bank

Asian Development Bank

Diterbitkan oleh Asian Development Bank, Juni 2005

## **PERINGATAN**

Dokumen ini telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris untuk menjangkau pengguna yang lebih luas. Namun, Bahasa Inggris adalah bahasa resmi Asian Development Bank (ADB) dan hanya dokumen asli yang ditulis dalam Bahasa Inggris yang merupakan teks yang otentik (resmi dan otoritatif). Segala sitiran harus mengacu ke dokumen aslinya dalam Bahasa Inggris. ADB tidak menjamin akurasi penterjemahan dan tidak bertanggung jawab atas segala penyimpangan dari dokumen aslinya.

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	4
<b>Daftar Singkatan</b> .....	3
I. Misi Asian Development Bank .....	4
A. Pengurangan Kemiskinan: Tujuan yang ingin dicapai oleh Asian Development Bank .....	4
B. Mengurangi Kemiskinan dengan Berpijak pada Keberhasilan .....	6
C. Tanggapan ADB terhadap Tantangan-tantangan yang Ada .....	7
II. Sebuah Kerangka untuk Pengurangan Kemiskinan: .....	8
<u>Tonggak-tonggak Strategi Pengurangan Kemiskinan</u> .....	8
A. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berpihak pada Kaum Miskin .....	8
B. Pembangunan Sosial yang Menyeluruh .....	11
C. Tata Kelola yang Baik .....	12
III. Strategi .....	14
A. Fokus Nasional yang Lebih Luas .....	14
B. Prioritas-prioritas Isu Lintas Sektor .....	18
IV. Melaksanakan Strategi .....	21
A. Mengelola Sumber Daya untuk Hasil-Hasil Pembangunan yang Optimal .....	20
B. Membantu Meningkatkan Pembelajaran dan Pengembangan Perangkat-perangkat Baru .....	24
C. Membangun Kapasitas ADB dalam Melaksanakan Strategi yang Telah Ditingkatkan .....	24
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Milenium .....	32
Serta Penilaian Kemajuan .....	32

# Kata Pengantar

Asian Development Bank (ADB) pada tahun 1999 secara resmi telah mencanangkan pengurangan kemiskinan sebagai tujuan yang ingin dicapainya dan telah pula mengumumkan Strategi Pengurangan Kemiskinan (PRS) untuk mencapai tujuan ini. Empat tahun setelah diberlakukannya PRS, ADB melaksanakan sebuah tinjauan menyeluruh guna mendapatkan umpan balik dari pengalaman melaksanakan PRS dan melihat relevansi PRS dalam konteks perubahan-perubahan besar yang terjadi baik di dalam wilayah Asia Pasifik maupun secara global. Proses ini selesai pada bulan Juli 2004. Dokumen ini meringkas elemen-elemen penting yang ada dalam strategi ADB untuk pengurangan kemiskinan yang ada pada saat ini yang telah diperkaya oleh umpan balik dari tinjauan tersebut.

Tahun 1999 yang lalu, wilayah Asia Pasifik masih bergulat dengan krisis ekonomi yang dua tahun sebelumnya melanda wilayah ini. Pemulihan ekonomi yang mantap telah terjadi sejak krisis keuangan tahun 1997 tersebut, namun wilayah Asia Pasifik kini menghadapi tantangan-tantangan politik dan ekonomi yang baru. Lebih jauh, sebuah arsitektur global untuk kerjasama pembangunan telah muncul sejalan dengan dicanangkannya Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium sebagai tolok ukur pengawasan kemajuan yang dicapai dalam pengurangan kemiskinan. Arsitektur baru ini memberikan tekanan lebih besar pada kemitraan pembangunan, penyelarasan, orientasi pada hasil, serta pengembangan kapasitas negara-negara berkembang dalam mendukung pengurangan kemiskinan.

Hasil dari tinjauan PRS menegaskan bahwa dalam menghadapi semua tantangan dan perubahan-perubahan ini, kerangka dasar untuk pengurangan kemiskinan yang terdiri dari tiga tonggak – pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta berpihak pada orang miskin; pembangunan sosial, dan tata kelola yang baik – masih memperlihatkan relevansinya. Namun agar lebih efektif, tinjauan PRS merekomendasikan perbaikan-perbaikan dalam arahan-arahan strategis, termasuk sebuah fokus nasional yang dapat menyelaraskan operasi-operasi ADB dengan strategi pengurangan kemiskinan di suatu negara, serta ditingkatkannya kemitraan yang terkait dengan strategi ini. Tinjauan ini juga menyerukan peningkatan perhatian pada hasil, pengawasan, dan evaluasi; serta penekanan yang lebih besar pada pembangunan kapasitas.

Walaupun kemajuan yang telah dicapai cukup signifikan, penderitaan akibat kemiskinan masih terlalu dominan di Asia dan Pasifik, yang merupakan tempat tinggal bagi dua per tiga dari penduduk miskin dunia. Kemiskinan pendapatan mungkin telah berkurang dalam tahun-tahun terakhir ini, namun kemajuan yang dicapai masih terlampau lamban di banyak bidang lain. Kita mampu dan wajib mempercepat upaya-upaya kita, melanjutkan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai di masa lampau, serta kembali

menyemangati diri kita sendiri untuk secara signifikan memperbaiki hasil dari intervensi-intervensi ADB dan mengurangi kemiskinan. Dengan berpegang pada pengalaman-pengalaman negara-negara berkembang anggota ADB dan temuan-temuan yang dihasilkan oleh tinjauan ini, PRS yang telah diperbaiki ini akan mengarahkan ADB dalam mencapai visinya mewujudkan wilayah Asia dan Pasifik yang bebas dari kemiskinan.

Tadao Chino  
Presiden  
Desember 2004

# Daftar Singkatan

ADB	Asian Development Bank
ADF	Dana Pembangunan Asia
CSP	Program dan Strategi Nasional
DMC	Negara Berkembang Anggota ADB
GMS	Sub Wilayah Mekong Raya
M&E	Pengawasan dan Evaluasi
MDGS	Tujuan Pembangunan Milenium
MfDR	Tata Kelola untuk Hasil-Hasil Pembangunan yang optimal
NGO	Organisasi Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat
NPRS	Strategi Pengurangan Kemiskinan Nasional
PPA	Kesepakatan Kemitraan Tentang Kemiskinan
PRS	Strategi Pengurangan Kemiskinan
RCSP	Program dan Strategi Kerjasama Regional
RSDD	Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Regional
SWAp	Pendekatan Bantuan Seluruh Sektor

# I. Misi Asian Development Bank

## A. Pengurangan Kemiskinan: Tujuan yang ingin dicapai oleh Asian Development Bank

1. Tujuan menjadikan wilayah Asia Pasifik bebas dari kemiskinan secara jelas mendefinisikan misi Asian Development Bank (ADB). Semua tujuan-tujuan strategis lainnya akan diusahakan lewat cara-cara yang paling efektif dalam memberikan sumbangan pada pencapaian tujuan utama ini. Kemiskinan adalah sebuah kondisi kemanusiaan yang tidak bisa diterima di abad 21 ini. Kemiskinan bukan sesuatu yang tidak dapat diubah; kebijakan dan tindakan publik mampu dan harus membantu melenyapkan kemiskinan. Walaupun beberapa kemajuan dalam mengurangi kemiskinan telah dicapai di wilayah Asia Pasifik, hampir dua per tiga dari penduduk miskin dunia berdiam di kawasan ini. Hal ini harus diubah.

2. Kemiskinan ditandai oleh kurangnya akses untuk mendapatkan barang, jasa, aset dan peluang penting yang menjadi hak setiap orang. Setiap orang harus bebas dari rasa lapar, harus dapat hidup dalam damai, dan harus mempunyai akses untuk mendapatkan pendidikan dasar dan jasa-jasa layanan kesehatan primer. Keluarga-keluarga miskin butuh mempertahankan kelangsungan hidup mereka dengan cara bekerja dan mendapatkan imbalan secara wajar serta seharusnya mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan terhadap guncangan-guncangan dari luar. Sebagai tambahan, perorangan maupun masyarakat juga miskin –dan cenderung terus miskin – apabila mereka tidak diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

3. ADB sejak awal selalu prihatin terhadap masalah pengurangan kemiskinan. Diawali dengan memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi, ADB secara bertahap memperluas pendekatannya dalam pembangunan dengan mencakup masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup dalam skala yang luas. Pengalaman yang diperoleh di wilayah Asia Pasifik telah meningkatkan rasa percaya diri baru bahwa kemiskinan absolut akan dapat dikurangi secara substansial.

4. Menyusul Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa, ADB mengintegrasikan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGSs) yang secara jelas menyebutkan sasaran-sasaran pengurangan kemiskinan dalam dimensi kemiskinan pendapatan dan non-pendapatan di dalam strategi pengurangan kemiskinan ADB. Kemajuan dalam mencapai MDGSs akan digunakan untuk memantau dampak dari strategi pengurangan kemiskinan. Dalam tingkatan operasional, ADB membantu negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya (DMCs) untuk mengintegrasikan Tujuan-tujuan Pembangunan Millenium ke dalam strategi-strategi pengurangan kemiskinan nasional mereka dan untuk memantau kemajuan-kemajuan yang dicapai dari strategi-strategi ini.



## B. Mengurangi Kemiskinan dengan Berpijak pada Keberhasilan

5. Pada awal tahun 70an, lebih dari separuh penduduk di wilayah Asia Pasifik merupakan kaum miskin. Di tahun 1990, sekitar 32% atau 900 juta orang di wilayah ini hidup dengan pendapatan kurang dari 1 dolar Amerika sehari. Sampai tahun 2000, jumlah ini telah berkurang sekitar 180 juta, menjadi 720 juta. Hal ini dicapai walaupun tahun 1997 terjadi krisis keuangan besar yang telah menekan pertumbuhan regional dan menimbulkan kemunduran sementara dalam pengurangan kemiskinan.

6. Namun demikian, jalan yang harus ditempuh masih panjang. Kemiskinan tetap bertahan di tingkatan yang tidak bisa diterima dan kemajuan yang dicapai tidak merata di seluruh wilayah. Dalam tahun 1970an dan 1980an, pengurangan kemiskinan paling banyak digaungkan di Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebaliknya, selama sepuluh tahun terakhir, pengurangan kemiskinan amat jelas terlihat di Republik Rakyat Cina dan di India. Menurut perhitungan resmi, prosentase jumlah orang miskin berkurang dari 31 % menjadi 16 % di Republik Rakyat Cina dan dari 41% menjadi 33% di India. Wilayah Asia Pasifik lainnya tidak mengalami perubahan yang berarti.

7. Sebagai tambahan, kemajuan dalam skala lebih kecil terjadi pada dimensi kemiskinan non-pendapatan. Misalnya, tingkat kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun di wilayah ini turun dari 85 kematian setiap 1.000 kelahiran hidup dalam tahun 1990 menjadi 70 di tahun 2000. Angka ini terlalu tendah untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Millenium yang menargetkan untuk mengurangi tingkat kematian balita sebanyak dua pertiga dari jumlah sebelumnya, sebelum tahun 2015. Tantangan terbesar berada di Asia Selatan yang tetap memiliki tingkat kematian anak dan bayi amat tinggi. Tingkat kematian balita di tahun 1990an turun secara perlahan di daerah ini dari 120 menjadi 94 setiap 1.000 kelahiran hidup sementara tingkat kematian bayi berkurang dari 69 menjadi 58 setiap 1.000 kelahiran hidup. Kemajuan dalam mengurangi proporsi anak-anak kurang gizi, dalam memperluas daerah cakupan imunisasi, dalam meningkatkan jumlah kelahiran yang didampingi oleh staf kesehatan terlatih, dan dalam memerangi HIV/AIDS juga tetap lamban. Indikator-indikator tersebut amat terkait pada status kaum perempuan yang buruk.<sup>1</sup>

8. Oleh sebab itu, walaupun secara keseluruhan wilayah Asia Pasifik terlihat berada di jalur semestinya dalam mencapai MDGSs di bidang kemiskinan pendapatan, beberapa negara kemungkinan akan tertinggal. Negara-negara lainnya, yang kemungkinan akan berhasil mencapai sasaran secara keseluruhan masih memiliki cukup banyak kantong-kantong kemiskinan. Lebih jauh, mempercepat langkah kemajuan dalam mencapai sasaran-sasaran MDGSs yang terkait pada kemiskinan non-pendapatan juga terus menjadi tantangan yang berat.

---

<sup>1</sup> Lihat Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP), 2003. *Promoting the Millennium Development Goals in Asia and the Pacific*. Bangkok:ESCAP dan UNDP

## C. Tanggapan ADB terhadap Tantangan-tantangan yang Ada

9. Dalam bulan Januari 2002, ADB telah mereorganisasi kegiatan-kegiatannya guna menyelaraskan struktur dan peraturan-peraturan bisnisnya dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pengurangan kemiskinan. Untuk memberikan fokus yang lebih tajam di tingkat nasional dan lebih berorientasi pada klien, kegiatan-kegiatan ADB pada saat ini secara bertahap didesentralisasikan kepada kantor-kantor perwakilan ADB yang telah cukup diperkuat. ADB merekrut lebih banyak tenaga ahli kemiskinan dan pembangunan untuk memperkuat kapasitas internal ADB dalam melaksanakan pengurangan kemiskinan. Di Kantor Pusat ADB, Departemen Pembangunan Regional dan Berkelanjutan (RSDD) telah didirikan untuk membantu menyelaraskan kebijakan-kebijakan ADB dengan strategi pengurangan kemiskinan (PRS), meninjau mutu kegiatan-kegiatan dan untuk membantu mengembangkan pengelolaan pengetahuan. Penelitian untuk menganalisa dampak kemiskinan telah dilakukan untuk memperbaiki strategi-strategi nasional dan rancangan proyek.

10. Tinjauan terhadap PRS menunjukkan bahwa fokus strategis yang lebih luas mengenai pengurangan kemiskinan telah memberikan dampak nyata bagi ADB dan kegiatan-kegiatannya. Kemitraan dengan masyarakat sipil dan badan-badan pembangunan lainnya telah diperkuat. Di tingkat negara, kajian terhadap kemiskinan telah membantu memberikan masukan pada program-program bantuan, sementara program-program dan strategi-strategi nasional (CSPs) secara umum menjadi lebih tajam terfokus pada pengurangan kemiskinan. Tinjauan ini menyimpulkan bahwa fokus dan orientasi strategis dari PRS tahun 1999 masih tetap relevan. Tinjauan ini merekomendasikan agar dukungan ADB untuk suatu negara lebih diselaraskan dengan strategi-strategi pengurangan kemiskinan nasional dari negara yang bersangkutan; dan juga untuk menjalankan pendekatan-pendekatan yang lebih menyeluruh dalam melakukan pengawasan, serta untuk menggeser fokus pengawasan kinerja ADB kepada hasil-hasil yang dicapai negara-negara anggota ADB dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium.

11. ADB mempergunakan kekuatan-kekuatan yang secara unik dimilikinya untuk mengurangi kemiskinan. Kekuatan-kekuatan ini meliputi fokus eksklusif mengenai Asia dan Pasifik; lokasi di kawasan Asia dan Pasifik, dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara-negara anggota dari kawasan ini. Pada saat yang sama, partisipasi dari anggota-anggota di luar kawasan Asia Pasifik memastikan bahwa sumberdaya-sumberdaya serta pandangan-pandangan global turut dipertimbangkan untuk menanggapi isu-isu pembangunan regional. ADB memberikan bantuan yang dibiayai oleh dana hibah, pinjaman sektor publik, dan kegiatan-kegiatan sektor swasta di bawah satu atap yang sama dan memanfaatkan sinergi yang dihasilkannya.

12. Sementara tanggung jawab utama untuk mengurangi kemiskinan berada pada negara-negara berkembang anggota ADB sendiri, sumbangan ADB secara intelektual dan finansial dapat memainkan peranan yang amat penting dan berpengaruh dalam memperkuat upaya-upaya negara-negara yang bersangkutan. PRS yang telah diperluas ini mewedahi komitmen ADB dalam memberantas kemiskinan di wilayah Asia Pasifik.

## **II. Sebuah Kerangka untuk Pengurangan Kemiskinan:**

### **Tonggak-tonggak Strategi Pengurangan Kemiskinan**

13. Sifat dasar kemiskinan amatlah kompleks dan faktor-faktor penyebabnya amat beragam. Kaum miskin mungkin tidak memiliki aset maupun kemampuan yang bersifat esensial karena mereka tinggal di daerah yang terpencil, rawan konflik, dan mempunyai sumberdaya sangat terbatas. Orang-orang ini mungkin rentan karena usia, kesehatan, lingkungan tempat tinggal, ataupun pekerjaan. Stagnasi dalam bidang ekonomi bisa mempersempit peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan atau produktif. Kaum miskin ini mungkin tidak memperoleh akses untuk mendapatkan aset-aset maupun jasa-jasa layanan karena mereka tergolong ke dalam etnis minoritas atau suatu komunitas yang dianggap lemah secara sosial, atau mungkin semata-mata karena mereka adalah kaum perempuan, cacat, atau berbeda. Dalam tingkatan yang lebih luas, kemiskinan mungkin berasal dari situasi dimana ada ketimpangan yang besar secara terus menerus akibat dari kepentingan dan struktur kekuasaan yang cenderung mempertahankan status quo. Keanekaragaman kondisi dan sebab-sebab kemiskinan tersebut mengisyaratkan bahwa intervensi-intervensi untuk mengurangi kemiskinan harus disesuaikan menurut keadaan-keadaan tertentu.

14. Sebuah strategi efektif untuk pengurangan kemiskinan harus mampu membantu terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berpihak pada kaum miskin; pembangunan sosial yang menyeluruh; serta tata kelola yang baik. Ketiga tonggak ini membentuk sebuah kerangka bagi PRS dan bersifat saling terkait dan saling mendukung. Pengurangan kemiskinan yang berhasil membutuhkan kebijakan-kebijakan yang secara bersamaan memperkuat ketiga tonggak ini. Kepentingan relatif dari setiap tonggak akan tergantung dari keadaan-keadaan di suatu negara dalam suatu saat tertentu.

15. Dalam kerangka tiga tonggak ini, intervensi-intervensi untuk pengurangan kemiskinan dapat bersifat jangka pendek (misalnya intervensi-intervensi untuk mempertahankan pelayanan dasar kepada kaum miskin); jangka menengah (misalnya intervensi-intervensi dengan sasaran tertentu); atau jangka panjang (seperti intervensi-intervensi yang membangun sumberdaya manusia, merangsang pertumbuhan yang berpihak kepada kaum miskin, dan mendorong perluasan sektor swasta.). Kekuatan-kekuatan utama ADB terletak pada penyediaan dana untuk investasi-investasi yang relatif cukup besar yang memiliki dampak jangka menengah dan jangka panjang dan dalam melaksanakan dialog dengan pemerintah untuk mendukung kebijakan dan reformasi kelembagaan yang memiliki dampak luas dan tidak langsung.

#### **A. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berpihak pada Kaum Miskin**

16. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menyeluruh adalah satu-satunya faktor terpenting dalam memelihara keberlanjutan pengurangan kemiskinan. Pengalaman perekonomian di Asia Timur dan Asia Tenggara menekankan pada pentingnya suatu kebijakan publik yang dinamis dan peran aktif dari negara yang bersangkutan dalam menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan terselenggaranya pertumbuhan ekonomi yang cepat.

17. **Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan.** Hubungan yang rumit antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tergambar pada kecenderungan-kecenderungan jangka panjang yang terjadi di Asia. Dari tahun 1960an sampai sekitar pertengahan 1990an, “keajaiban-keajaiban” perekonomian Asia Timur muncul lebih cepat dari yang terjadi di kelompok negara berkembang lainnya di dunia. Sampai dengan tahun 1990an, kemiskinan dapat dinyatakan telah lenyap dari negara-negara industri baru di Asia Timur, sementara Indonesia, Malaysia, dan Thailand juga telah membuat langkah-langkah yang mengesankan. Indikator-indikator sosial yang ada di banyak negara-negara ini secara perlahan-lahan berubah menuju ke arah negara industri pada umumnya. Sebaliknya, Asia Selatan mengalami pertumbuhan yang lamban di tiga dekade sebelum awal tahun 1980an dengan pertumbuhan pendapatan per kapita rata-rata berkisar antara 1,5% sampai 2,0 % per tahun. Karenanya pengurangan kemiskinan pun berjalan amat lambat.

18. Hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan pada dasarnya bersifat dua arah. Pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan menyebabkan peningkatan permintaan akan tenaga kerja dan peningkatan upah, dan dengan demikian mengurangi kemiskinan. Pendapatan yang lebih baik menyebabkan peningkatan produktifitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan juga memperbaiki pendapatan publik dan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk prasarana fisik dan sosial, sehingga membantu mengurangi kemiskinan serta memperbaiki potensi produktif perekonomian.

19. **Kebijakan-kebijakan untuk Meningkatkan Penggunaan Tenaga Kerja.** Walaupun pertumbuhan ekonomi membantu mengurangi kemiskinan, peningkatan penggunaan tenaga kerja yang menyeluruh akan membawa hasil yang lebih besar. Kombinasi antara tata kelola ekonomi makro yang baik dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan yang stabil di bidang ketenagakerjaan telah terbukti sangat ampuh dalam mengukur keberpihakan pada kaum miskin. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup penghilangan secara perlahan segala intervensi yang merusak pasar. Kebijakan-kebijakan lain dalam kategori ini adalah kebijakan-kebijakan yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk sektor swasta dan kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan ketenagakerjaan dan peluang-peluang yang menghasilkan pendapatan untuk kaum perempuan dan kelompok-kelompok lain yang mungkin berada di luar angkatan tenaga kerja formal. Sama halnya, peluang-peluang untuk berwiraswasta telah pula memberikan sumbangan penting bagi pengurangan kemiskinan.

20. **Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Sektor Swasta.** Sektor swasta, penggerak pertumbuhan ekonomi, mempunyai peran langsung dalam pengurangan kemiskinan. Sektor swasta dapat berpartisipasi dalam membangun prasarana fisik dan

sosial, termasuk juga pengadaan pelayanan dasar yang akan membantu kaum miskin. Agar sektor swasta dapat bersumbangsih lebih efektif dalam penyediaan jasa-jasa pelayanan tersebut, sebuah lingkungan yang mendukung harus dibangun, dan sektor keuangan harus dikembangkan. Sejalan dengan meluasnya peran sektor swasta, peran pemerintah seharusnya bergeser dari sebagai pemilik dan produsen barang dan jasa menjadi sebagai fasilitator dan regulator. Sebuah kerangka pengaturan yang efektif menjadi sangat penting untuk meningkatkan persaingan, melaksanakan praktek-praktek dan standar-standar yang adil, serta memastikan agar pelayanan dasar dapat menjangkau kaum miskin.

**21. Pertumbuhan Ekonomi dan Prasarana.** Pembangunan prasarana mempunyai berbagai dampak sosial dan ekonomi. Pembangunan prasarana dapat memberikan sumbangan bagi pengurangan kemiskinan baik secara tidak langsung yaitu dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, maupun secara langsung dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki akses terhadap kegiatan-kegiatan perekonomian dan pelayanan-pelayanan sosial dasar. Agar perekonomian dapat bertumbuh, amat penting memperluas prasarana dan jasa-jasa terkait yang dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Memperluas peluang di tingkat daerah membutuhkan integrasi dengan pasar nasional dengan difasilitasi prasarana. Pertumbuhan yang bergantung pada pasar umumnya membawa keuntungan bagi daerah yang cukup makmur yang prasarana dan sumber daya manusianya telah cukup maju. Di daerah yang terbelakang, keluarga-keluarga yang amat miskin mungkin tidak dapat menikmati peningkatan jumlah peluang yang dihasilkan di tempat lainnya, dan investasi publik yang sesuai dengan sasaran mungkin dibutuhkan.

**22. Kerjasama Regional untuk Memperkuat Pertumbuhan.** Cara penting lainnya untuk mempercepat pertumbuhan adalah dengan bekerjasama secara regional dan subregional sehingga dapat membuka pasar lebih luas, menciptakan perekonomian berskala ekonomis, dan berdasarkan pembagian tugas. Kerjasama semacam ini terutama berguna bagi negara-negara kecil yang pilihannya terbatas. Kerjasama serupa ini memberikan hasil maksimal di tingkat subregional seperti yang terjadi di Subregion Mekong Raya (GMS) dan di “segitiga pertumbuhan” yang dirintis ADB di Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, di Asia Selatan, dan di republik-republik di Asia Tengah. Dalam rangka memperkuat dan mendukung kerjasama semacam ini, ADB mempersiapkan dan melaksanakan strategi dan program kerjasama regional (RCSPs). Beberapa RCSPs telah dipersiapkan dan sedang dijalankan, seperti misalnya RCSPs untuk Sub Wilayah Mekong Raya dan Asia Tengah. Di tahun 2003, ADB telah mempersiapkan RCSP pertamanya untuk daerah Pasifik.

**23. Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.** Lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan isu utama dalam pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kaum miskin. Pertumbuhan akan berumur pendek apabila tidak dapat melindungi lingkungan dan sumberdaya alam. Walaupun banyak kerusakan di masa lampau disebabkan oleh konflik kepentingan yang melibatkan kekuasaan, tekanan-tekanan akibat kemiskinan dan populasi telah pula melipatgandakan kesulitan yang ada melalui penggundulan hutan, pemotongan rumput yang berlebihan, dan pengurangan populasi ikan. Kaum miskin

pedesaan sering terpaksa tinggal di daratan dan daerah perairan labil yang membutuhkan tata kelola sumberdaya yang peka dalam menghadapi degradasi yang semakin meningkat. Kaum miskin perkotaan rawan terhadap penyakit yang disebabkan oleh kondisi lingkungan hidup yang terlalu padat dan tercemar polusi. Strategi-strategi pengurangan kemiskinan harus mengintegrasikan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang meningkatkan mutu dan produktifitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

## **B. Pembangunan Sosial yang Menyeluruh**

24. Pertumbuhan ekonomi harus disertai oleh program-program pembangunan sosial yang memungkinkan kelompok-kelompok yang kurang beruntung mendapatkan keuntungan dari perluasan kesempatan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tersebut. ADB mendukung upaya-upaya DMCs dengan jalan membantu mereka merencanakan pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan melalui pengembangan kebijakan-kebijakan, lembaga-lembaga, serta prasarana yang dibutuhkan untuk memberikan jasa-jasa pelayanan sosial kepada kaum miskin secara efektif. Konsisten dengan MDGSs, ADB mengakui bahwa setiap orang seharusnya memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan dasar, layanan kesehatan dasar, dan jasa-jasa pelayanan penting lainnya. Akses semacam ini membuka peluang bagi kaum miskin untuk memperbaiki kualitas hidup mereka dan untuk berpartisipasi secara lebih utuh di dalam masyarakat. Sebuah pendekatan proaktif harus dipakai untuk membantu mengurangi diskriminasi sosial dan ekonomi dan untuk mendorong munculnya gagasan-gagasan yang dapat memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok yang tersingkir. Penjangkauan dan keberlanjutan pembangunan sosial menjadi lebih baik pada saat semua orang, terutama kaum miskin dan tersingkir, memiliki peluang untuk membentuk kebijakan-kebijakan dan program-program publik. Memastikan bahwa suara kaum miskin dapat didengar pada semua tingkat pengambilan keputusan adalah pusat keberhasilan upaya-upaya pembangunan sosial.

25. **Sumber Daya Manusia.** Sumber daya manusia seringkali merupakan satu-satunya aset yang dimiliki kaum miskin, dan perkembangannya memiliki kepentingan yang mendasar dalam pengurangan kemiskinan. Membangun keahlian-keahlian yang dapat dipasarkan, melindungi kaum miskin terhadap bahaya dan resiko kesehatan, serta menghapus praktek-praktek membahayakan seperti penggunaan tenaga anak, merupakan inti dari pengembangan sumber daya manusia. Adalah perlu untuk memastikan relevansi, kualitas dan kuantitas jasa-jasa layanan sosial untuk meningkatkan produktifitas dan partisipasi seluruh anggota masyarakat.

26. **Kebijakan Kependudukan.** Korelasi antara ukuran keluarga dan kemiskinan yang berlarut-larut pada umumnya bersifat kuat, terutama di daerah-daerah pedesaan. Sebagian besar negara menyadari pentingnya pengurangan jumlah pertumbuhan penduduk dengan menempatkan prioritas tertinggi pada: (i) dipastikannya penyediaan pendidikan yang sama bagi anak-anak perempuan; (ii) penyediaan akses terhadap jasa-jasa layanan reproduktif; dan (iii) ditingkatkannya peluang-peluang ekonomi untuk kaum perempuan.

**27. Jender dan Pembangunan.** Di banyak kelompok masyarakat, kaum perempuan secara tidak adil menanggung beban kemiskinan dan tersingkir secara sistematis dari akses untuk mendapatkan aset-aset dan jasa-jasa layanan penting. Memperbaiki status mereka merupakan aspek penting dalam kemiskinan dan hal ini memberikan hasil pengembalian yang penting di bidang sosioekonomi melalui pengurangan biaya kesehatan dan kesejahteraan dan pengurangan tingkat kelahiran serta kematian ibu dan bayi. Mengemukakan suara perempuan dan mendorong partisipasi penuh mereka dapat memberikan sumbangan penting kepada pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

**28. Modal Sosial.** Pada saat kemiskinan dinyatakan, kohesi sosial seringkali lemah, dan komunitas-komunitas menderita akibat konflik, marginalisasi, dan pengucilan. Dalam kasus-kasus semacam ini, kebijakan-kebijakan yang kuat dan proaktif dibutuhkan guna membalikkan pandangan mengenai ketidakberdayaan sosial dan psikologis, untuk meningkatkan rasa keberdayaan, dan untuk menciptakan lembaga-lembaga partisipatif yang murni. Modal sosial dan masyarakat yang lebih luas dapat ditingkatkan melalui perundang-undangan anti diskriminasi, reformasi pertanahan, pengakuan hukum terhadap kelompok-kelompok pengguna, dan sistem-sistem peradilan yang dapat diakses. Langkah-langkah terperinci mungkin dibutuhkan untuk memberikan jasa-jasa layanan sosial yang sesuai dan akses yang adil kepada peluang-peluang ekonomi di kalangan minoritas etnis.

**29. Perlindungan Sosial.** Setiap kelompok masyarakat memiliki anggota yang rentan karena usia, penyakit, cacat, bencana alam, krisis ekonomi, maupun konflik sipil. Perlindungan sosial terdiri dari sekelompok program yang dirancang untuk membantu perorangan, rumah tangga, dan komunitas-komunitas untuk mengelola resiko secara lebih baik dan untuk menjamin keamanan ekonomi. Program-program tersebut mencakup pensiun hari tua, asuransi bagi penganggur dan orang cacat, serta jaring pengaman sosial. Juga termasuk dalam program-program semacam ini adalah kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki mobilitas tenaga kerja dan untuk menerapkan standar-standar ketenagakerjaan. Penerapan strategi-stategi dan program-program publik yang efisien guna mengelola resiko dan kerentanan dapat membantu kaum miskin dan tersingkir untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

### **C. Tata Kelola yang Baik**

**30. Reformasi Sektor Publik.** Tata kelola yang baik amat penting dalam pengurangan kemiskinan karena tata kelola yang lemah akan merugikan kaum miskin secara tidak adil. Ketidakefisienan sektor publik, korupsi, dan pemborosan menyebabkan tidak memadainya sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk jasa-jasa layanan publik dan program-program anti kemiskinan. Tata kelola yang baik memfasilitasi kebijakan-kebijakan yang partisipatif dan berpihak pada kaum miskin serta tata kelola ekonomi makro yang baik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga. Pengelolaan pendapatan yang lebih baik serta penentuan prioritas dan pengaturan pengeluaran secara lebih hati-hati, terutama untuk jasa-jasa layanan dasar, sangat penting. Kurangnya akuntabilitas, dominasi elit daerah, korupsi yang meluas, pola

historis dari ketidakadilan, dan kurangnya partisipasi kaum miskin, juga harus ditanggapi lewat penyediaan layanan publik agar standar hidup kaum miskin dapat ditingkatkan.

**31. Tata Kelola Korporasi.** Tata kelola yang baik diperlukan di sektor swasta untuk melindungi depositor, investor, serta konsumen; meningkatkan kompetisi; meningkatkan efisiensi; dan memperluas sumberdaya keuangan bagi semua kalangan. Sebagaimana yang ditunjukkan perekonomian Asia dan krisis keuangan tahun 1997, tata kelola yang baik juga penting untuk menghindari atau mengurangi dahsyatnya pukulan ekonomi di era liberalisasi dan globalisasi yang meningkat.

**32. Pengarusutamaan Tata Kelola yang Baik.** ADB mengarusutamakan tata kelola yang baik ke dalam kegiatan-kegiatannya. ADB berjuang untuk meneruskan penyediaan layanan publik sampai kepada tingkatan yang serendah mungkin. ADB membantu pemerintah DMC untuk beroperasi secara transparan dan akuntabel, untuk menjunjung hak-hak dasar, menyediakan keamanan publik, dan untuk menegakkan perundang-undangan serta menekankan pentingnya reformasi hukum. Penekanan juga diberikan pada proses-proses partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil dan kaum miskin dalam meningkatkan dan menjaga agar pemerintah terus tanggap dan bertanggung jawab.

**33. Kemitraan dengan Masyarakat Sipil.** Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam meningkatkan tata pemerintahan yang baik. Berbagai organisasi non pemerintah (LSM) – baik nasional maupun internasional- terlibat dalam pekerjaan pembangunan atau dalam memperjuangkan hak-hak legal kaum miskin. Didirikannya Pusat LSM di tahun 2001 telah sangat membantu ADB berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai LSM. LSM-LSM juga telah dilibatkan secara dekat dalam mempersiapkan kebijakan-kebijakan ADB, terutama mengenai air, energi, lingkungan hidup dan perlindungan sosial. ADB akan terus bekerjasama dengan LSM-LSM dengan memanfaatkan pengalaman serta pandangan mereka dan menggunakan jaringan akar rumput mereka.

### **III. Strategi**

34. Bagian-bagian berikut ini menggambarkan bagaimana ketiga tonggak pengurangan kemiskinan diterjemahkan ke dalam sebuah strategi yang menyeluruh guna memberikan arahan bagi reformasi kebijakan, proyek-proyek investasi, dan pembangunan kapasitas di dalam masing-masing negara.

#### **A. Fokus Negara yang Lebih Luas**

35. Memfokuskan pada masing-masing negara merupakan elemen penting dari PRS dan untuk ini dibutuhkan perbaikan kualitas analisa kemiskinan dan pekerjaan-pekerjaan analisa lainnya; memperkuat kemitraan yang berkaitan dengan strategi-strategi pengurangan kemiskinan nasional (NPRS); dan mengembangkan strategi dan program nasional yang bermutu tinggi, serta berorientasi pada hasil.

##### **1. Analisa Kemiskinan yang Berfokus pada Negara**

36. Analisa kemiskinan ini diawali dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendala dan peluang mengurangi kemiskinan di negara yang mengadakan kajian terhadap sifat dasar, intensitas, dan sebaran kemiskinan; penyebab kemiskinan; dampak kebijakan publik; fokus dan efisiensi belanja pemerintah ; serta efektifitas program dan lembaga pemerintah. ADB akan melibatkan pemangku kepentingan lainnya dalam analisa ini dan akan meneruskan pengembangan data yang sudah dirintis oleh pemerintah dan komunitas donor. Lebih lanjut, analisa ini akan membahas hubungan antara kasus kemiskinan dan intervensi-intervensi dalam berbagai sektor dan bidang lintas sektor. Bila mungkin, ADB akan memanfaatkan kajian-kajian kemiskinan yang telah dilakukan oleh para mitra pembangunannya.

37. ADB mengakui sejumlah besar pekerjaan yang berlangsung di wilayah Asia Pasifik dan banyak negara peminjam telah mengembangkan strategi pengurangan kemiskinan dan sistem pengawasan secara baik, dalam beberapa kasus hal ini dikembangkan dengan bantuan ADB. ADB akan mendukung perbaikan pengumpulan dan tata kelola data, riset, dan analisa kemiskinan. Institut ADB akan membantu memformulasikan strategi jangka panjang pembangunan ekonomi dan sosial serta pengurangan kemiskinan. Kajian terhadap kemiskinan akan meninjau ulang dan memberikan pandangan terhadap strategi nasional serta merekomendasikan kebijakan.

## **2. Membangun Kemitraan yang Berkaitan dengan Strategi Pengurangan Kemiskinan Nasional**

38. Prospek pengurangan kemiskinan akan maksimal apabila DMCs memimpin persiapan NPRS dan berkomitmen menjalankannya secara penuh. ADB harus memperkuat keterkaitan hubungan operasionalnya dengan NPRS dengan cara memobilisasi penuh semua pemangku kepentingan, memperkuat kemitraan, dan memperbaiki mutu CSPnya. Kantor-kantor perwakilan ADB akan memainkan peran utama dalam upaya-upaya tersebut.

39. Pengembangan kemitraan sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai MDGSS; pemerintah DMC harus memimpin upaya ke arah itu. ADB berkolaborasi dengan badan-badan PBB dan bank-bank multilateral guna mengadakan kajian mengenai kemiskinan, memahami berbagai pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengurangi kemiskinan, dan untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan NPRS. Kemitraan semacam ini akan memungkinkan ADB memobilisasi sumberdaya tambahan untuk meningkatkan intervensi dan akses terhadap dana hibah untuk menguji pendekatan-pendekatan inovatif pengurangan kemiskinan. LSM juga secara aktif terlibat dalam penyusunan kerangka baru kerjasama ADB-LSM untuk tahun 2003 – 2005.

40. Kerjasama yang erat dan upaya harmonisasi di antara para mitra pembangunan dapat mengurangi biaya transaksi, karenanya dapat meningkatkan efektifitas pembangunan. ADB akan meningkatkan kolaborasinya dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, badan-badan PBB, dan organisasi-organisasi pembangunan bilateral. Kolaborasi ini meliputi strategi nasional, pelaksanaan program, pembuatan analisa, pendanaan bersama, pendekatan bantuan di tingkat sektor (SWAp), advokasi kebijakan, dan pengukuran serta pengawasan hasil yang dicapai sehubungan dengan MDGSS dan beberapa indikator kemiskinan lain. Melalui kantor perwakilannya, ADB akan memperkuat kerjasama donor dan akan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat sipil mengawasi pencapaian pengurangan kemiskinan.

## **3. Strategi-strategi Nasional dan Pembuatan Program yang Berorientasi pada Hasil**

41. Sejak tahun 2000, sebagian besar DMC telah memformulasikan dan mulai menggunakan strategi-strategi pengurangan kemiskinan atau telah memasukkan strategi-strategi tersebut ke dalam rencana-rencana pembangunan nasional mereka. Jika diminta, ADB akan memberikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas dalam mempersiapkan serta memperbaharui strategi-strategi tersebut dan akan turut serta dalam diskusi-diskusi yang dipimpin oleh pemerintah –yang merupakan pemangku kepentingan- untuk membahas strategi-strategi tersebut.<sup>2</sup> CSP kemudian akan menerjemahkan substansi dan

---

<sup>2</sup> Tahun 1999 ketika PRS mulai dipergunakan, perjanjian-perjanjian kemitraan kemiskinan (PPAs) disepakati bersama dengan pemerintah DMCs untuk menandai komitmen ADB dalam memenuhi tujuan-tujuan pengurangan kemiskinan nasional. Saat ini, 24 PPAs telah berhenti dipergunakan. NPRS telah menggantikan PPAs. Karenanya, ADB tidak akan lagi mempergunakan PPAs apabila suatu DMC telah mulai mempergunakan NPRS. Di negara-negara di mana PPA telah berhenti dipergunakan, tujuan-tujuan

prioritas-prioritas yang ada dalam NPRS ke dalam kegiatan-kegiatan terperinci dan program pemberian pinjaman dan bantuan.

42. CSP pada umumnya dipersiapkan dalam kurun waktu 3-5 tahun namun diperbaharui secara teratur. Tujuan-tujuan pembangunan di dalam NPRS akan secara kritis dinilai selama fase persiapan CSP guna memastikan bahwa peran dan tujuan-tujuan ADB bersifat jelas, kemudian ada strategi dan program yang kredibel dalam CSP untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan ada rincian mengenai indikator-indikator keberhasilan yang harus dicapai dalam waktu tertentu. CSP harus dipersiapkan dalam kemitraan yang erat dengan mitra-mitra pembangunan dan para pemangku kepentingan, dan CSP harus mencerminkan rasa memiliki DMC sepenuhnya.

43. CSP akan menentukan sektor, subsektor, dan jenis proyek sesuai dengan konteks spesifik kemiskinan yang ada di suatu negara, strategi-strategi serta prioritas-prioritas nasional negara tersebut dalam pengurangan kemiskinan, dan adanya praktek-praktek baik dalam memperluas pengurangan kemiskinan. CSP juga akan merinci apakah kegiatan-kegiatan ADB akan secara langsung menjadikan kaum miskin sebagai sasaran atau membantu mereka secara tidak langsung. Pilihan ini akan diambil berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam mengenai negara yang bersangkutan.

44. Semua CSP baru akan memiliki kerangka kerja untuk hasil-hasil yang mencakup pengawasan dan yang menghubungkan kendala-kendala pengurangan kemiskinan yang telah diidentifikasi dalam kajian-kajian mengenai kemiskinan dengan program-program yang diusulkan, keluaran-keluaran yang diinginkan, dan hasil-hasil yang diharapkan. Meningkatkan kualitas penilaian-penilaian mengenai negara yang bersangkutan – kemiskinan, sektor, bidang lintas sektor, dan kinerja bantuan ADB sebelumnya untuk negara tersebut - akan membantu memperbaiki konsistensi dan keterkaitannya dengan CSP.

45. Hasil-hasil yang dicapai oleh CSP diukur oleh indikator-indikator yang berlaku bagi setiap tonggak, sektor, dan prioritas tematis yang terkait. CSP akan mengindikasikan bagaimana suatu hasil yang ingin dicapai dapat diwujudkan melalui program nasional dengan cara menghubungkan setiap pinjaman, bantuan teknis, atau produk pengetahuan dengan satu atau lebih indikator hasil nasional. Untuk melengkapi kerangka hasil, hubungan antara keluaran-keluaran proyek dan hasil-hasil sektor akan ditegaskan dalam program kerja sektor. Penyusunan indikator-indikator hasil per sektor tersebut di dalam CSP akan memperlihatkan kontribusi keseluruhan yang diberikan oleh program nasional dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan bagi tonggak-tonggak strategis dan prioritas-prioritas tematis. (Gambar 1)

---

dan sasaran-sasaran jangka menengah yang dicanangkan dalam NPRS akan memberikan arahan bagi perencanaan di masa mendatang.



## B. Prioritas-prioritas Lintas Sektoral

46. Lima isu lintas sektoral melengkapi ketiga tonggak dan merupakan unsur penting dari PRS: kesetaraan jender, lingkungan hidup yang berkelanjutan, pembangunan sektor swasta, kerjasama regional, dan pembangunan kapasitas.

**47. Kesetaraan Jender.** Dua per tiga kaum miskin di wilayah Asia Pasifik adalah perempuan, karena itu memperbaiki status perempuan merupakan inti dari semua strategi pengurangan kemiskinan di wilayah ini. ADB mempertimbangkan isu-isu mengenai jender dan pembangunan ke dalam pekerjaan-pekerjaan, pinjaman-pinjaman, bantuan teknis, dan kegiatan-kegiatan ekonomi dan sektor lainnya. ADB mempersiapkan dokumen-dokumen singkat nasional mengenai jender dan berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan mitra pembangunan untuk belajar mengenai status perempuan di dalam negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Analisa-analisa jender ADB dituangkan langsung ke dalam CSP dan rancangan-rancangan proyek dan analisa-analisa tersebut juga mendukung dialog kebijakan untuk mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan mengenai jender secara lebih efektif ke dalam kegiatan-kegiatan dan reformasi kebijakan publik secara lebih luas. Langkah-langkah jender yang bersifat menyeluruh dipromosikan di proyek-proyek yang relevan. ADB merancang dan melaksanakan proyek-proyek yang berdiri sendiri atau komponen-komponen proyek yang menjadikan isu-isu jender sebagai sasaran. Intervensi-intervensi semacam ini akan terus dibutuhkan selama kendala dan hambatan struktural masih membatasi perkembangan kaum perempuan. Hal ini terutama terjadi dalam situasi-situasi dimana tradisi budaya mendikte pemisahan jenis kelamin ataupun dimana para perempuan membutuhkan bantuan khusus untuk memungkinkan mereka berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial.

**48. Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.** Lingkungan hidup yang berkelanjutan sangat penting bagi pengurangan kemiskinan dan terkait sangat erat dengan strategi-strategi pembangunan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi; menyediakan jasa-jasa layanan penting, termasuk air bersih dan sanitasi; meningkatkan produktifitas pertanian; dan memperbaiki kualitas hidup kaum miskin secara menyeluruh. Agar pembangunan menyeluruh dapat dicapai, pemahaman yang lebih baik terhadap implikasi-implikasi kebijakan pengurangan kemiskinan terhadap lingkungan hidup serta dampak-dampak kebijakan-kebijakan mengenai lingkungan hidup pada kaum miskin harus dimiliki. Lingkungan hidup dan sumberdaya-sumberdaya alam yang ada di wilayah Asia Pasifik sedang mengalami tekanan amat besar. Menyadari situasi ini, ADB mengangkat sebuah kebijakan lingkungan hidup yang mengatur (i) intervensi-intervensi lingkungan hidup; (ii) pengarusutamaan isu-isu lingkungan pada proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (iii) pemeliharaan sistem-sistem penunjang kehidupan baik di tingkat regional maupun global; (iv) mendorong pengembangan kemitraan yang efektif; dan (v) pengintegrasian pertimbangan-pertimbangan mengenai lingkungan hidup ke dalam operasi-operasi ADB. ADB membantu memerangi penurunan kualitas lingkungan hidup melalui intervensi-intervensi yang berupa pemberian nasihat, intervensi di tingkat regional maupun proyek. Sebagai tambahan dari intervensi-intervensi yang berdiri sendiri yang memiliki tujuan-tujuan khusus mengenai lingkungan

hidup, banyak isu lingkungan hidup yang penting ditanggapi pula lewat proyek-proyek yang mempunyai tujuan-tujuan pembangunan lainnya. Kajian-kajian mengenai lingkungan hidup disosialisasikan dan dibahas secara luas, dan kebijakan pelindung yang sesuai diterapkan untuk menjamin bahwa proyek-proyek ADB akan mematuhi standar-standar tertinggi tentang pembangunan yang berkelanjutan.

**49. Pembangunan Sektor Swasta.** Pembangunan sektor swasta yang kuat dan dinamis penting bagi pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berjangka panjang serta diperlukan untuk mengurangi kemiskinan. ADB membantu negara berkembang menciptakan lingkungan yang memungkinkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan dan yang melahirkan peluang usaha melalui kegiatan sektor publik. Kontribusi sektor swasta terhadap pengurangan kemiskinan ditingkatkan melalui pengembangan perusahaan, perluasan prasarana dan layanan publik lainnya, serta perbaikan mutu dan peraturan ketenagakerjaan dengan cara memperbaiki tata kelola dan tanggung jawab perusahaan. Operator swasta diperbolehkan menyediakan prasana dan layanan publik serta melaksanakan proyek yang sasarannya kaum miskin. Reformasi perundang-undangan dijalankan sebelum diluncurkan pendekatan spesifik-sektoral seperti privatisasi, pemberian pekerjaan kepada pihak ketiga, dan kemitraan swasta-publik. Dalam kerangka CSP, kegiatan sektor swasta yang tanpa dijamin pemerintah mengupayakan dampak pembangunan melalui pendekatan baru dan dengan menghilangkan kendala investasi.

**50. Kerjasama Regional.** Pembangunan ekonomi meningkat pada saat negara berkembang secara aktif mengusahakan kerjasama regional dan subregional. Kerjasama regional dapat mendorong pembangunan sektor swasta, meningkatkan perdamaian dan stabilitas serta menyediakan lebih banyak peluang-peluang ekonomi bagi mereka yang tinggal di dekat perbatasan yang seringkali merupakan penduduk paling miskin.. Kerjasama itu penting untuk bisa menyediakan barang-barang kebutuhan publik yang ditujukan untuk mengurangi kendala dan menambah peluang bersama seperti pencegahan penyakit menular dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Melihat catatan keberhasilannya selama ini, ADB akan terus memberikan prioritas tinggi bagi kerjasama regional sebagai cara bagi negara-negara berkembang menghapuskan kendala fisik maupun kelembagaan terhadap perdagangan dan investasi. Dengan demikian biaya transaksi dapat dikurangi dan hal ini menjadi daya tarik bagi para investor yang potensial. Kerjasama regional dapat membantu negara-negara tersebut mencapai skala ekonomis, memperluas basis produksi domestik dan ekspor, menyelaraskan berbagai standar dan membagi teknologi. Kerja sama regional juga bisa membantu negara-negara tersebut untuk secara bersama mengembangkan sarana yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan publik yang penting seperti layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, kelistrikan, dan perlindungan sosial. Kerjasama regional juga dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan hidup regional, membantu perang melawan kejahatan global seperti pencucian uang dan perdagangan perempuan dan anak-anak, serta meningkatkan posisi tawar masing-masing negara secara global. Kerjasama regional juga berguna untuk berbagi segala jenis pengetahuan.

**51. Pengembangan Kapasitas: Sebuah Penekanan Baru pada Strategi Pengurangan Kemiskinan (PRS).** Untuk mencapai pertumbuhan yang menyeluruh dibutuhkan peningkatan kapasitas negara-negara berkembang anggota ADB dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan-kebijakan, melakukan pembaharuan dan investasi. Pentingnya pembangunan kapasitas juga digarisbawahi oleh semakin besarnya penekanan yang diberikan pada peran Strategi Pengurangan Kemiskinan Nasional (NPRS) untuk mengelola pengurangan kemiskinan di masing-masing negara. Hal ini membutuhkan sebuah dukungan strategis pada pengembangan pengetahuan dan ketrampilan kelompok-kelompok masyarakat, organisasi-organisasi, dan perorangan – termasuk kaum miskin- secara terus menerus di negara-negara berkembang anggota ADB. ADB telah lama mengakui pentingnya pembangunan kapasitas dan telah menyediakan dukungan luas untuk itu. ADB akan berupaya menyediakan dukungan strategis untuk meningkatkan kapasitas negara berkembang anggotanya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan-kebijakan, serta melakukan pembaharuan dan investasi yang dibutuhkan guna mengurangi kemiskinan. ADB akan terus mendukung pembangunan kapasitas dengan mengembangkan dan membagi produk-produk pengetahuan baru; dengan meninjau kendala-kendala dan dengan memberikan nasihat sesuai dengan permintaan. ADB juga akan mendukung investasi-investasi yang ditujukan untuk pengembangan lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi yang sepenuhnya akuntabel, efektif, efisien dalam kegiatan-kegiatan mereka, serta bersifat tanggap terhadap kebutuhan kaum miskin.

## IV. Melaksanakan Strategi

52. Pelaksanaan PRS telah dan akan terus mendapatkan prioritas yang amat tinggi; ADB mempunyai komitmen untuk mengurangi kemiskinan dan akan menggunakan daya dan pengaruhnya untuk mencapai hal tersebut. Bab ini akan menjabarkan tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan penting yang akan dilaksanakan sebagai upaya mencapai tujuan tersebut.

### A. Mengelola Sumber Daya untuk Hasil-hasil Pembangunan yang Optimal

53. Manajemen dan kegiatan-kegiatan ADB akan menjadi semakin berorientasi pada hasil agar dapat membuat perbaikan-perbaikan yang nyata dalam hasil-hasil pembangunan yang dicapai oleh kegiatan-kegiatan ADB. Sejumlah perbaikan di bidang manajemen telah meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, serta sifat tanggap ADB. Perbaikan-perbaikan tersebut mencakup: (i) pembentukan sebuah “unit tata kelola untuk hasil-hasil pembangunan yang optimal” (MfDR); (ii) pengembangan proses-proses/prosedur-prosedur untuk MfDR; (iii) pengarusutamaan MfDR di seluruh jajaran ADB; (iv) perbaikan sistem dan proses tata kelola sumberdaya manusia serta pelaksanaan sebuah strategi tata kelola sumberdaya manusia yang baru; (v) penyelarasan kebijakan-kebijakan, strategi-strategi, serta pendekatan-pendekatan operasional dengan agenda strategis utama ADB, termasuk PRS dan kerangka strategis jangka panjang yang telah disempurnakan; dan (vi) perbaikan pendekatan-pendekatan ADB untuk mendukung pembangunan kapasitas dalam negara-negara berkembang anggotanya. Sejalan dengan kerangka menyeluruh MfDR, sebuah sistem pengawasan dan evaluasi yang berorientasi pada hasil (sistem Monitoring dan Evaluasi) akan dikembangkan pada tingkatan proyek, sektor dan lintas sektor, negara dan kelembagaan.

**54. Monitoring dan Evaluasi pada Tingkat Proyek.** Penguatan kinerja pengelolaan proyek akan menjamin bahwa kontribusi pada hasil-hasil dan pada tonggak-tonggak serta gagasan-gagasan tematis yang dirinci dalam CSPs dibuat secara jelas. Sebuah kerangka logis untuk setiap proyek akan terus merinci kontribusi-kontribusi proyek tersebut bagi hasil-hasil sektor. Tim-tim proyek akan memastikan bahwa proyek dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara efektif serta dilakukan penilaian di akhir pelaksanaan proyek. Penilaian ini akan dilengkapi dengan evaluasi yang bersifat independen setelah proyek berakhir yang dilakukan oleh Departemen khusus ADB yang bertugas melakukan evaluasi kegiatan .

**55. Monitoring dan Evaluasi pada Tingkat Sektor dan Bidang Lintas Sektor .** ADB akan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kemajuan yang dicapai oleh pelaksanaan PRS dalam kegiatan-kegiatan sektor dan prioritas-prioritas bidang lintas sektor. Laporan-laporan tahunan akan dipersiapkan dengan masukan dari departemen-

departemen regional, jaringan-jaringan sektor dan lintas sektor, serta sistem manajemen kinerja proyek. Laporan tersebut berisi rangkuman kegiatan-kegiatan dalam sektor dan bidang lintas sektor selama setahun dan garis besar rencana-rencana untuk tahun selanjutnya. Laporan-laporan tersebut akan menilai keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi sektor dan bidang lintas sektor, dalam meningkatkan kualitas teknis, dalam menyelaraskan dan melaksanakan proyek-proyek dengan PRS, dalam mengarusutamakan pertimbangan-pertimbangan lintas sektor, dan dalam memberikan sumbangan pada pengelolaan pengetahuan. Tanggung jawab untuk laporan-laporan sektor dan lintas sektor akan terletak di Departemen Pembangunan Regional dan Berkelanjutan ADB - RSDD.

**56. Monitoring dan Evaluasi di Tingkat Nasional.** Sejalan dengan kerangka tata kelola ADB untuk mendapatkan hasil pembangunan yang optimal, semua Strategi dan Program Nasional ADB yang baru akan memuat sebuah kerangka hasil-hasil (yang mencakup sebuah kerangka pengawasan). Kerangka tersebut akan menghubungkan kendala-kendala pengurangan kemiskinan yang diidentifikasi dalam NPRS dengan program yang diusulkan, keluaran-keluaran yang diinginkan dan hasil-hasil yang diharapkan. Hasil-hasil dari suatu negara akan diawasi dengan mengacu pada tiga tonggak dan prioritas-prioritas lintas sektor dan akan merupakan gabungan dari seluruh intervensi-intervensi ADB – baik yang bersifat pinjaman maupun non pinjaman – di dalam sebuah negara. Tim-tim nasional akan bertanggung-jawab dalam mengawasi kemajuan dari keluaran-keluaran serta hasil-hasil.

**57. Monitoring dan Evaluasi di Tingkatan Kelembagaan.** Hasil-hasil dari pelaksanaan PRS dalam mengurangi kemiskinan akan dilihat melalui pencapaian tujuan No.1 hingga 7 dari Tujuan-Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) yang terdiri dari 11 sasaran dan 31 indikator. Walaupun diakui bahwa hasil-hasil tersebut tidak dapat semata-mata diharapkan hanya dari upaya-upaya ADB, tetaplah penting untuk melihat berbagai kecenderungan untuk memastikan bahwa upaya-upaya ADB secara efektif selaras dengan sasaran-sasaran MDGs. Hasil-hasil yang diharapkan dari pelaksanaan PRS adalah perbaikan-perbaikan dalam CSP dan hasil-hasil proyek, dalam kebijakan-kebijakan negara-negara berkembang anggota ADB dan kapasitas kelembagaan mereka untuk pengurangan kemiskinan, dan dalam kemampuan ADB untuk mengurangi kemiskinan. Keluaran-keluaran dari pelaksanaan PRS akan diukur dalam dimensi-dimensi berikut ini: (a) perbaikan mutu CSP; (b) perbaikan mutu proyek; (c) pelaksanaan proyek yang efektif; (d) peningkatan kontribusi dari landasan pengetahuan yang mendukung pengurangan kemiskinan; (e) kemitraan yang lebih kuat guna mencapai MDGs. Tanggung jawab keseluruhan dalam pengawasan kelembagaan akan berada pada RSDD dan didukung oleh Departemen Kebijakan dan Strategi. Sebuah laporan tahunan akan dipersiapkan untuk merangkum penilaian pada tingkatan kelembagaan dari pengalaman melaksanakan PRS di tahun sebelumnya.

**58. Penggolongan Proyek untuk Melacak Masukan.** Di daerah di mana kaum miskin “terjebak” oleh keadaan geografis, budaya, atau sosial, intervensi-intervensi dengan sasaran khusus dibutuhkan untuk memastikan terciptanya peluang-peluang yang sama guna mengatasi keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan tersebut dan untuk

berpartisipasi dalam arus utama pembangunan. Walaupun tidak ada sasaran kuantitatif yang akan dicanangkan, proyek-proyek akan digolongkan sebagai intervensi dengan sasaran khusus jika proyek-proyek tersebut fokus pada rumahtangga, di kawasan geografis tertentu atau di sektor/subsektor yang secara langsung mendukung pencapaian MDGs yang terkait dengan kemiskinan non-pendapatan.

## **B. Membantu Meningkatkan Pembelajaran dan Pengembangan Perangkat-perangkat Baru**

59. Menggunakan pengetahuan – baik yang bersifat global, regional, maupun lokal – dalam kampanye-kampanye pengurangan kemiskinan sangat penting agar Strategi Pengurangan Kemiskinan (PRS) bisa berhasil dilaksanakan. Sosialisasi yang efektif akan menjamin bahwa pelajaran-pelajaran yang telah diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada saat ini dipergunakan secara efektif dalam perencanaan kegiatan-kegiatan di masa mendatang dan dalam membantu negara-negara berkembang anggota ADB dalam menyusun strategi, rencana, dan program untuk memerangi kemiskinan.

60. Di dalam beberapa situasi, instrumen-instrumen baru maupun cara-cara baru dalam menggunakan instrumen-instrumen yang ada sekarang, mungkin dibutuhkan. Prakarsa terhadap pendekatan-pendekatan baru dalam pengurangan kemiskinan telah dimulai di beberapa negara berkembang anggota ADB. Pinjaman kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk membangun kapasitas mereka dalam mengurangi kemiskinan telah mencapai momentum setelah PRS tahun 1999 mulai dipergunakan, terutama di negara-negara yang lebih besar. Variasi-variasi dari instrumen-instrumen yang sudah dipergunakan saat ini akan diformalisasikan supaya dapat diaplikasikan secara lebih sesuai dan lebih luas. Hal ini mencakup: (i) Menjalani mitra dengan badan-badan lain secara lebih efektif dalam pemberian bantuan yang menggunakan pendekatan sektor secara luas (SWAp) guna mencapai tujuan-tujuan sektor; (ii) pinjaman-pinjaman untuk mendorong pembaharuan kebijakan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan NPRS guna memberikan dukungan jangka panjang terhadap pelaksanaan Strategi Pengurangan Kemiskinan Nasional (NPRS); (iii) sebuah pinjaman program (*program loan*) yang bersifat luwes yang memungkinkan diberikannya bantuan secara lebih luwes untuk mendukung reformasi-reformasi kebijakan dan pengembangan kelembagaan; (iv) lebih banyak diberikan pinjaman-pinjaman untuk mendukung kegiatan percontohan (*pilot loans*) untuk menguji pendekatan-pendekatan inovatif terhadap pengurangan kemiskinan; (v) peningkatan dana-dana investasi sosial; dan (vi) LSM-LSM pendukung yang telah memiliki catatan yang meyakinkan dalam bekerja bersama kaum miskin. Sebuah elemen dana hibah telah diperkenalkan dalam Dana Pembangunan Asia IX.

## **C. Membangun Kapasitas ADB dalam Melaksanakan Strategi yang Telah Ditingkatkan**

61. **Kemampuan Keuangan.** Kemampuan ADB dalam melaksanakan PRS tergantung pada tersedianya sumber daya keuangan secara terus menerus, terutama dana-dana pinjaman lunak. Ada kebutuhan yang mendesak agar para donor memberikan komitmen untuk menyediakan sumberdaya keuangan dalam jangka menengah untuk memperbaiki kepastian dan keberlangsungan bantuan keuangan, khususnya pada saat negara-negara berkembang anggota ADB meluncurkan strategi-strategi dan program-program pengurangan kemiskinan jangka menengah. Hasil-hasil analisa yang bermutu dan dukungan berkelanjutan terhadap pengembangan kapasitas sangat tergantung pada tersedianya dana hibah yang memadai dan penggunaan dana tersebut secara efektif.

Sama halnya, bantuan terhadap negara-negara yang beresiko tidak mampu mencapai Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium dan negara-negara yang tidak mampu melanjutkan pinjaman luar negeri lebih jauh, akan membutuhkan akses terhadap sumber daya pinjaman lunak ADB dari Dana Pembangunan Asia. Sejalan dengan kerangka kebijakan ADB untuk negara-negara yang berpendapatan menengah, ADB sedang menyederhanakan syarat-syarat pinjaman dan memperbaiki ketentuan-ketentuan pemberian pinjaman dana yang diusahakan ADB dari pasar uang agar kegiatan-kegiatan ADB dalam menangani kemiskinan bisa lebih fokus.

62. ADB akan menambah keragaman dari perangkat keuangan dan investasinya agar bantuan yang diberikan bisa lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan yang kompleks dalam pengurangan kemiskinan. ADB akan berusaha menyediakan bantuan hibah secara selektif untuk membantu negara-negara yang paling miskin; ADB akan mendukung pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) di negara-negara dengan pendapatan menengah; dan ADB akan merambah cara-cara baru untuk meningkatkan sumberdaya untuk kerjasama regional.

63. Sebuah kemitraan global yang efektif untuk pembangunan amat penting bagi keberhasilan strategi pengurangan kemiskinan mana pun. Lambatnya kemajuan untuk mendapatkan bantuan internasional guna mengurangi kemiskinan dan dalam mencapai MDGSs mengakibatkan sebuah resiko serius dalam pelaksanaan PRS. ADB akan mendukung upaya-upaya internasional untuk mencapai tujuan MDGS yang ke delapan

**64. Kapasitas Organisasional.** ADB akan terus memperkuat kapasitas organisasionalnya untuk secara efektif mengupayakan pengurangan kemiskinan di negara-negara berkembang anggotanya. Tanggung jawab melaksanakan PRS terutama terletak pada departemen-departemen operasional yang didukung oleh Departemen Regional dan Pembangunan Berkelanjutan ADB (RSDD); fungsi departemen-departemen operasional maupun RSDD akan diperkuat untuk kepentingan tersebut. Kompetensi organisasional ADB sedang diperkuat sejalan dengan strategi baru mengenai sumberdaya manusia. Pembagian beban kerja akan lebih diseimbangkan dan keselarasan antara insentif bagi staf dengan tujuan pengurangan kemiskinan akan diupayakan. Hal ini dilakukan terutama untuk mempersiapkan analisa-analisa nasional dan CSP yang bermutu tinggi, untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan proyek, untuk meningkatkan kemitraan, dan untuk berbagi pengetahuan dan inovasi-inovasi mengenai pengurangan kemiskinan.

65. Untuk melaksanakan sebuah strategi operasional secara efektif, PRS harus dimengerti secara baik oleh seluruh jajaran organisasi. ADB akan terus membangun landasan pengetahuan yang dibutuhkan lewat pelatihan ketrampilan yang terfokus dengan baik dan program-program mentoring. ADB akan menyediakan pelatihan mengenai metodologi dan teknik-teknis pengurangan kemiskinan bagi semua staf baru dan staf operasional, termasuk kepala-kepala departemen serta para manajer.

66. Guna mempertajam fokusnya di suatu negara, ADB akan meningkatkan kapasitas kantor-kantor perwakilannya guna mengawasi dan membuat laporan mengenai kemiskinan dan untuk membantu mengintegrasikan kemiskinan ke dalam kegiatan-

kegiatan ADB. Hal yang disebut belakangan ini akan membutuhkan keterlibatan aktif yang berkesinambungan dari kantor-kantor perwakilan ADB dalam pembuatan program dan dialog kebijakan secara umum di suatu negara serta ditingkatkannya peran mereka dalam pengelolaan proyek. Kantor-kantor perwakilan ADB akan didorong lebih lanjut untuk membantu mengembangkan kemitraan dengan mitra-mitra pembangunan, termasuk badan-badan bilateral dan LSM-LSM, untuk melengkapi kapasitas mereka sendiri dalam melakukan penilaian-penilaian serta analisa-analisa kemiskinan.

**PENILAIAN KEMAJUAN DALAM MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM**  
**Status Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium di Asia**

Negara	Proporsi Populasi Kurang dari \$1 Per Hari th 1993 Keseimbangan Daya Beli (%)		Ratio Anak Perempuan terhadap Anak Laki-laki pada Pendidikan Dasar		Angka Kematian balita (per 1000 kelahiran hidup)		Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	
	1990	2000	Awal 1990	Akhir 1990	1990	2001	1990	2001
Afghanistan	----	----	0.52 (90)	0.47 (95)	260	257	162	165
Azerbaijan	<2.0	----	0.94 (90)	0.95 (98)	105	105	74	74
Bangladesh	35.9	29.1	0.81 (90)	0.92 (98)	144	77	96	51
Bhutan	----	----	0.74 (93)	0.82 (98)	166	95	407	74
Kamboja	48.3	35.5	0.81 (93)	0.84 (98)	115	438	80	97
Republik Rakyat Cina	31.3	15.3	0.86 (90)	0.92 (98)	49	39	38	31
Kepulauan Cook	----	----	----	0.91 (98)	32	23	26	19
Fiji	----	----	0.95 (91)	0.93 (98)	31	21	25	18
India	52.5	44.2	0.71 (90)	0.81 (98)	123	93	84	67
Indonesia	20.6	8.3	0.95 (90)	0.94 (96)	91	45	60	33
Kazakhstan	<2.0	<2.0	0.97 (93)	0.97 (98)	67	76	54	61
Kiribati	----	----	0.98 (90)	0.96 (98)	88	69	65	51
Republik Kyrgyz	----	----	0.99 (90)	0.96 (98)	83	61	69	52
Republik Rakyat Demokratik Lao	53.0	34.6	0.77 (90)	0.82 (98)	163	100	120	87
Malaysia	0.5	0.0	0.95 (90)	0.94 (98)	21	8	16	8
Maldives	----	----	0.96 (92)	0.96 (98)	115	77	80	58
Kepulauan Marshal	----	----	----	0.93 (98)	92	66	63	54
Mikronesia	----	----	----	----	31	24	26	20

---- = tidak tersedia

Sumber: Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) Meningkatkan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium di Asia dan Pasifik: Menjawab Tantangan-tantangan Pengurangan Kemiskinan, 2003. Tersedia pada: <http://www.unescap.org/LDC&Poverty/MDGS.asp>

**PENILAIAN KEMAJUAN DALAM MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM**  
**Status Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium di Asia (Lanjutan)**

Negara	Proporsi Penduduk berpendapatan kurang dari \$1 Per Hari th 1993 Keseimbangan Daya Beli (%)		Ratio Anak Perempuan terhadap Anak Laki-laki pada Pendidikan Dasar		Angka Kematian balita (per 1000 kelahiran hidup)		Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	
	1990	2000	Awal 1990	Akhir 1990	1990	2001	1990	2001
	Mongolia	13.9	----	1.00 (90)	1.01 (98)	107	76	77
Myanmar	----	----	0.94 (90)	0.97 (98)	130	109	91	77
Nauru	----	----	----	1.02 (98)	----	30	----	25
Nepal	37.7	----	0.56 (90)	0.72 (98)	145	91	100	66
Pakistan	47.8	31.0	0.48 (90)	0.55 (98)	128	109	96	84
Papua New Guinea	23.7	18.5	0.8 (90)	0.82 (98)	101	94	79	70
Philippines	19.1	13.2	0.95 (90)	0.94 (95)	66	38	45	29
Republik Korea	<2.0	----	0.94 (90)	0.89 (97)	9	5	8	5
Samoa	----	----	0.98 (90)	0.95 (98)	42	25	33	20
Kepulauan Solomon	----	----	0.8 (90)	----	36	24	29	20
Sri Lanka	4.0	6.6	0.93 (90)	0.94 (98)	23	19	20	17
Tajikistan	----	----	0.96 (90)	0.95 (96)	78	72	57	53
Thailand	12.5	5.2	0.94 (90)	0.93 (98)	40	28	34	24
Timor-Leste	----	----	----	----	----	----	----	85
Tonga	----	----	0.92 (90)	0.86 (98)	27	20	23	17
Turkmenistan	20.9	12.1	----	----	97	99	56	76
Tuvalu	----	----	0.91 <sup>a</sup> (90)	0.85 (98)	56	52	40	38
Uzbekistan	3.3	----	0.96 (90)	----	62	68	47	52
Vanuatu	----	----	0.98 (90)	0.91 (98)	70	42	52	34
Viet Nam	50.8	9.6	----	0.90 (98)	50	38	36	30

---- = tidak tersedia

Sumber: Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) Meningkatkan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium di Asia dan Pasifik: Menjawab Tantangan-tantangan Pengurangan Kemiskinan, 2003. Tersedia pada: <http://www.unescap.org/LDC&Poverty/MDGS.asp>

**PENILAIAN KEMAJUAN DALAM MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM**  
**Status Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium di Asia (Lanjutan)**

Negara	Perkiraan Tingkat Prevalensi HIV (%) pada Kaum Muda (15-24), akhir 1999				Proporsi Daerah yang dicakup sebelum tahun		Cakupan Persediaan Air Perkotaan (%) Hutan (%)		Cakupan Persediaan Air Pedesaan (%)	
	Perempuan		Pria		1990	2000	1990	2000	1990	2000
	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi						
Afghanistan	----	----	----	----	2.1	2.1	----	19	----	11
Azerbaijan	----	----	----	----	11.5	13.1	----	93	----	58
Bangladesh	<0.01	0.01	<0.01	0.02	9.0	10.2	99	99	93	97
Bhutan	----	----	----	----	64.2	64.2	----	86	----	60
Kamboja	2.31	4.70	0.94	3.77	56.1	52.9	----	54	----	26
Republik Rakyat Cina	0.02	0.03	0.07	0.18	15.6	17.5	99	94	60	66
Kepulauan Cook	----	----	----	----	95.7	95.7	----	----	----	----
Fiji	----	----	----	----	45.5	44.6	----	43	----	51
India	0.40	0.82	0.14	0.58	21.4	21.6	88	95	61	79
Indonesia	0.02	0.04	0.01	0.04	65.2	58.0	92	90	62	69
Kazakhstan	----	----	0.05	0.09	3.7	4.5	----	98	----	82
Kiribati	----	----	----	----	38.4	38.4	----	82	----	25
Republik Kyrgyz	----	----	----	----	4.0	5.2	----	98	----	66
Republik Rakyat Demokratik Lao	0.05	0.05	0.02	0.05	56.7	54.4	----	61	----	29
Malaysia	0.08	0.10	0.03	0.82	65.9	58.7	----	----	----	94
Maldives	----	----	----	----	3.3	3.3	----	100	----	100
Kepulauan Marshal	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Mikronesia	----	----	----	----	34.8	21.7	----	----	----	----

---- = tidak tersedia

HIV = Human Immunodeficiency Virus (Virus Penurunan Kekebalan Manusia)

Sumber: Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) Meningkatkan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium di Asia dan Pasifik: Menjawab Tantangan-tantangan Pengurangan Kemiskinan, 2003. Tersedia pada: <http://www.unescap.org/LDC&Poverty/MDGS.asp>

**PENILAIAN KEMAJUAN DALAM MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM**  
**Status Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium di Asia (Lanjutan)**

Negara	Perkiraan Tingkat Prevalensi HIV (%) pada Kaum Muda (15-24), akhir 1999				Proporsi Daerah yang dicakup sebelum tahun		Cakupan Persediaan Air Perkotaan (%) Hutan (%)		Cakupan Persediaan Air Pedesaan (%)	
	Perempuan		Pria		1990	2000	1990	2000	1990	2000
	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi						
Mongolia	----	----	----	----	7.2	6.8	----	77	----	30
Myanmar	1.13	2.30	0.42	1.67	6.2	52.3	----	89	----	66
Nauru	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Nepal	0.13	0.26	0.06	0.23	32.7	27.3	93	94	64	87
Pakistan	0.03	0.1	0.02	0.10	3.6	3.1	96	95	77	87
Papua New Guinea	0.16	0.33	0.03	0.13	70.1	67.6	88	88	32	32
Philippines	0.04	0.08	0.01	0.05	22.4	19.4	93	91	82	79
Republik Korea	<0.01	0.01	0.01	0.03	63.8	63.3	----	97	----	71
Samoa	----	----	----	----	46.1	37.2	----	95	----	100
Kepulauan Solomon	----	----	----	----	90.3	88.8	----	94	----	65
Sri Lanka	0.0	0.07	0.02	0.07	35.4	30.0	91	98	62	70
Tajikistan	----	----	----	----	2.7	2.8	----	93	----	47
Thailand	1.53	3.11	0.47	1.89	31.1	28.9	87	95	78	81
Timor-Leste	----	----	----	----	36.6	34.3	----	----	----	----
Tonga	----	----	----	----	6.5	5.5	----	100	----	100
Turkmenistan	----	----	----	----	8.0	8.0	----	----	----	----
Tuvalu	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Uzbekistan	----	----	----	----	4.6	4.8	----	94	----	79
Vanuatu	----	----	----	----	36.2	36.7	----	63	----	94
Viet Nam	0.09	0.10	0.15	0.38	28.6	30.2	86	95	48	72

---- = tidak tersedia

HIV = Human Immunodeficiency Virus (Virus Penurunan Kekebalan Manusia)

Sumber: Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) Meningkatkan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium di Asia dan Pasifik: Menjawab Tantangan-tantangan Pengurangan Kemiskinan, 2003. Tersedia pada: <http://www.unescap.org/LDC&Poverty/MDGS.asp>

Lampiran

## **TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN MILENIUM SERTA PENILAIAN KEMAJUAN**

Tujuan Pembangunan Milenium

Pada tahun 2015, 189 Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berkomitmen untuk:

### **1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan**

Target 1. Mengurangi separuh proporsi penduduk yang berpendapatan kurang dari \$1 per hari.

Target 2. Mengurangi separuh proporsi penduduk yang menderita kelaparan.

### **2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua**

Target 3. Memastikan bahwa semua anak, baik perempuan maupun laki-laki, dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

### **3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan**

Target 4. Menghapus ketimpangan gender di jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, serta di semua jenjang pendidikan pada tahun 2015.

### **4. Menurunkan angka kematian anak**

Target 5. Mengurangi dua pertiga jumlah kematian anak di bawah usia lima tahun.

### **5. Meningkatkan kesehatan ibu**

Target 6. Mengurangi tiga perempat jumlah kematian ibu melahirkan.

### **6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain**

Target 7. Menghentikan dan mulai menurunkan laju penyebaran HIV/AIDS.

Target 8. Menghentikan dan mulai menurunkan laju penyebaran malaria serta penyakit menular lainnya.

### **7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup**

Target 9. Memadukan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan dan program nasional; serta memulihkan kerusakan beragam sumberdaya lingkungan.

Target 10. Mengurangi separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses berkelanjutan pada air minum bersih dan sanitasi dasar.

Target 11. Memperbaiki kehidupan setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh pada tahun 2020 secara signifikan.

## **8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan**

Target 12. Mengembangkan lebih lanjut sistem perdagangan dan keuangan yang terbuka, berdasarkan aturan jelas, mudah dipahami serta tidak diskriminatif, termasuk komitmen bagi tata pemerintahan, pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang baik –nasional maupun internasional.

Target 13. Menanggapi kebutuhan khusus negara-negara belum berkembang. Ini mencakup akses bebas tarif dan kuota bagi ekspor mereka; meningkatkan penghapusan utang bagi negara-negara pengutang berat; pembatalan utang bilateral resmi; dan bantuan pembangunan resmi yang lebih besar bagi negara-negara yang berkomitmen pada pengurangan kemiskinan.

Target 14. Menanggapi kebutuhan khusus negara-negara yang terkurung daratan dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.

Target 15. Menyelesaikan secara menyeluruh masalah utang negara-negara berkembang melalui berbagai upaya nasional maupun internasional agar utang dapat dilunasi dan dikelola secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Target 16. Melalui kerjasama dengan negara-negara berkembang, membangun lapangan kerja yang layak dan produktif bagi generasi muda.

Target 17. Melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan farmasi, menyediakan akses lebih luas bagi obat-obatan penting dengan harga terjangkau.

Target 18. Melalui kerjasama dengan sektor swasta, memperluas manfaat teknologi baru khususnya teknologi informasi dan komunikasi.